

Paradigma Pembelajaran Sejarah dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

History Learning Paradigm in Merdeka Belajar and Kampus Merdeka

Merina^{1✉}, M. Ari Kuwoto², Djono³

^{1✉ 2 3} Universitas Negeri Sebelas Maret

E-mail: merina@student.uns.ac.id ✉, arikuwoto@student.uns.ac.id, djono@staff.uns.ac.id

Diterima: 20 Oktober 2024

| Direvisi: 30 November 2024

| Diterbitkan: 1 Desember 2024

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Paradigm,
Independent Curriculum,
Education,
History.

The Merdeka Curriculum is a curriculum designed for learning recovery in Indonesian education, focusing on critical thinking skills, creativity, and problem-solving. The history lessons in the Merdeka Curriculum have also undergone changes, such as the addition of materials and teaching tools. This research aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum in history lessons at high schools in Jakarta, covering perspectives, materials, methods, media, evaluation, and challenges encountered. The research method used is a qualitative research method with a literature study approach. The results show that the implementation of the Merdeka Curriculum aims to improve the quality of learning in schools and provide teachers and students with the autonomy to design different learning processes. Changes in the Merdeka Curriculum for history lessons include the addition of materials and teaching tools. The challenges faced by teachers include creating teaching devices that require adaptation and learning. Students in history lessons need to memorize a lot of historical material and require time to understand the material being taught.

Kata Kunci:

Paradigma,
Kurikulum Merdeka,
Pendidikan,
Sejarah.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dirancang untuk pemulihan pembelajaran dalam pendidikan Indonesia yang berorientasi pada keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Pelajaran sejarah dalam kurikulum merdeka juga telah mengalami perubahan seperti penambahan materi dan alat ajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kurikulum merdeka dalam pelajaran sejarah di SMA Jakarta yang mencakup perspektif, materi, metode, media, evaluasi, dan kendala yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan memberikan rasa mandiri kepada guru dan siswa untuk merancang proses pembelajaran yang berbeda. Terdapat perubahan dalam kurikulum merdeka pada pelajaran sejarah, yaitu penambahan materi dan alat ajar. Kendala yang dialami oleh guru adalah dalam membuat perangkat ajar yang memerlukan adaptasi dan pembelajaran. Siswa dalam pembelajaran sejarah perlu menghafal banyak materi sejarah dan membutuhkan waktu untuk memahami materi yang diajarkan.

PENDAHULUAN

Hasil berbagai macam penilaian yang dimandatkan kepada institusi pendidikan disesuaikan dengan instrumen-instrumen utama yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar, seperti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2015, Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) dilihat tahun 2019 pola instrument assessment as learning dirubah dengan membaca digital, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) sebuah riset internasional yang dilakukan dari tahun 1995 sampai 2015 dengan menganalisis kemampuan kelas 4 dan kelas 8 dibidang matematika dan IPA , dan Programme for International Student Assessment (PISA) melihat pencapaian siswa dalam bidang literasi dari berbagai negara dengan mengalami grafik naik di 2018, terlihat adanya kesenjangan kualitas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kondisi tersebut terjadi disebabkan terbatasnya akses terhadap guru dan sumber belajar berkualitas dan teknologi bagi sebagian peserta didik, yang secara ekonomi masih kurang beruntung (disadvantaged family) (Ainia, 2020).

Keadaan ini sudah mulai dirasakan sebagian peserta didik, guru, dan pengelola pendidikan Merdeka Belajar berpeluang untuk mempersempit perbedaan kualitas (quality divide) tersebut. Melalui program intervensi pendidikan yang sedang dilakukan, terutama dengan konsep kurikulum yang fleksibel dan beragam, penguatan otonomi sekolah dan kapasitas guru (berbasis kebutuhan), kepala sekolah (instructional management) dan

teknologi pembelajaran (Rahmawati et al., 2022). Esensi dari Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar untuk para guru dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran; karenanya, pemerataan akses teknologi menjadi keniscayaan (Pangestu & Rochmat, 2021). Merdeka Belajar menjadi revolusi pendidikan Indonesia yang makin berkualitas. Kemerdekaan memberikan berbagai macam fleksibilitas di kurikulum.

Kemerdekaan adalah guru diberikan hak untuk memasukkan kearifan lokal dan kemerdekaan pemikiran agar anak-anak bangsa bisa berpikir secara merdeka dan tidak terjajah oleh pemikiran sempit. Merdeka Belajar dilaksanakan untuk memerdekakan otak dan kesempatan ekonomi bagi penerus bangsa, memerdekakan guru untuk bisa menentukan apa yang terbaik bagi level kompetensi dan minat dari anak-anaknya, serta memerdekakan institusi-institusi pendidikan untuk berinovasi dan mencoba hal-hal yang baru (Rahmawati et al., 2022). Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam (Hendri, 2020) bahwa “Merdeka Belajar” adalah kemerdekaan berpikir. Nadiem Makarim mengartikan merdeka belajar sebagai sebuah kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Artinya sekolah, guru dan siswanya punya kebebasan dalam belajar dan menyiapkan pembelajaran. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3) mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia seluruh warga negara Indonesia menjadi manusia yang seutuhnya. Perwujudan dari amanat ini yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi landasan Yuridis dan filosofis untuk menerapkan kebijakan Merdeka Belajar, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar mandiri dan kreatif dimana guru dan siswa mempunyai kebebasan dalam belajar dan menyiapkan pembelajaran (Hendri, 2020). Pendidikan saat ini memiliki terlalu banyak beban birokrasi yang terlalu berbelit (Martono et al., 2020). Merdeka Belajar merevitalisasi sistem pendidikan untuk membangun kompetensi utama agar kegiatan belajar menjadi menyenangkan. Pada kategori pedagogi, Merdeka Belajar mendorong berbasis kompetensi dan nilai-nilai, kurikulum penilaian (Mustaghfiroh, 2020). Serta pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat kepada siswa. Pada kategori Kurikulum Merdeka Belajar membentuk kurikulum berdasarkan kompetensi, fokus kepada soft skill dan pengembangan karakter, sedangkan pada kategori sistem penilaian, Merdeka Belajar menghadirkan penilaian yang bersifat formatif, serta berdasarkan portofolio (Aan et al., 2021).

Direktorat Pembinaan SMA dari capaian prestasi tersebut terlihat konsep Merdeka Belajar sudah diterapkan oleh SMA, khususnya di kelas 10 IPA maupun IPS. Menurut Efrisko Pemerintah memberikan kebebasan dalam hal kurikulum yang digunakan oleh masing-masing sekolah, tinggal bagaimana sekolah menyikapi kebijakan tersebut dengan mengimplementasikan di

sekolah masing-masing sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh sekolah (Kurniawan, 2021). Permasalahan pendidikan adalah masih banyak upaya pengendalian, guru dan peserta didik belum merasakan otonomi yang cukup untuk menentukan arah kebijakan belajar dan mengajarnya karena masih diatur dengan regulasi yang mengikat. Hasil studi literatur Sherly dalam (Halim & Sudirman, 2020) untuk mengimplementasikan program “Merdeka Belajar” perlu transformasi kurikulum sekolah dan pembelajaran; transformasi manajemen pendidikan nasional dan transformasi manajemen pendidikan daerah dan otonomi sekolah.

Kebijakan Merdeka Belajar menjadi reformasi pembelajaran yang berdampak pada tuntutan perubahan paradigma pendidik dalam merancang Kurikulum, mengembangkan pembelajaran dan mengevaluasinya Merdeka Belajar menjadikan pembelajaran sangat fleksibel baik yang berkenaan dengan konten, strategi, maupun tempat belajarnya (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 2022). Kesenjangan yang terjadi tersebut peneliti akan melihat proses yang terjadi di sekolah yang akan diteliti, pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang sudah diprogramkan memiliki tingkat ketercapaian dalam Kurikulum tersebut. Kurikulum Merdeka atau yang dikenal dengan Merdeka Belajar merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kondisi pendidikan Indonesia pasca pandemi Covid-19 (Winarti et al., 2022). Kebijakan tersebut dicanangkan sebagai upaya pemerintah membantu memulihkan pembelajaran di Indonesia melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek (Hidayati et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode kualitatif berfokus pada pengamatan lingkungan sosial melalui interaksi langsung dengan subyek penelitian untuk memahami interpretasi dari apa yang diamati. Menurut Creswell, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai fenomena utama yang menjadi topik penelitian. Metode ini juga bertujuan untuk menghasilkan teori-teori yang berkaitan dengan hubungan kausal, yang memungkinkan peneliti membuat prediksi dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif berupaya membangun pemahaman mendalam (*verstehen*) dan memberikan penjelasan mengenai perilaku serta karakter manusia sebagai makhluk sosial (Rukajat, 2018). Moleong menambahkan bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena yang dialami subyek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan (Moleong, 2014).

Metode studi pustaka adalah metode penelitian yang memanfaatkan sumber literatur yang sudah ada untuk mendapatkan informasi, analisis, atau pemahaman tentang suatu topik. Menurut Zed, ada empat tahapan dalam studi pustaka, termasuk menyiapkan daftar pustaka kerja, mengatur waktu, membaca, dan mencatat bahan penelitian. Maka dari itu dalam prosesnya metode ini melibatkan identifikasi, pemilihan, dan penelusuran sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta dokumen terkait lainnya. Dalam studi pustaka, informasi dikumpulkan secara sistematis, disusun, dan disintesis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

menyeluruh mengenai topik yang dibahas. (Nina Adlini et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)

Kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menerbitkan kebijakan mengenai pengembangan Kurikulum Merdeka (Tohir, 2020). Opsi kebijakan pengembangan Kurikulum Merdeka ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai tambahan upaya untuk melakukan pemulihan krisis pembelajaran selama 2022-2024 akibat adanya pandemi COVID-19. Kebijakan Kemdikbudristek mengenai Kurikulum Nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran, merujuk pada kondisi di mana pandemi COVID-19 yang menyebabkan kendala dan dampak yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Hal tersebut, senada dengan penelitian yang disampaikan (Amalia & Sa'adah, 2020), bahwa COVID-19 ini memberikan dampak terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan beberapa tantangan yang perlu dihadapi berkaitan dengan keterbatasan kemampuan adaptasi dan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet terbatas, serta kurangnya keinginan untuk menganggarkan (Tohir, 2020).

Kurikulum 2013 menjadi satu-satunya kurikulum yang digunakan pada masa sebelum pandemi di satuan pendidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pada masa di awal pandemi tahun 2020 sampai dengan

tahun 2021, Kemdikbudristek mengeluarkan kebijakan untuk pengimplementasian Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan). Kemudian pengimplementasian tersebut, juga menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Setelah itu, pada masa pandemi tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Kemdikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan SMK Pusat Keunggulan (PK) (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 2022). Di masa sebelum dan pandemi COVID-19, Kemdikbudristek menerbitkan kebijakan untuk penggunaan Kurikulum 2013 serta penyederhanaan Kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pelaksanaan proses pembelajaran dengan substansi materi yang esensial.

Keberadaan Kurikulum Merdeka di SP/SMK-PK menjadi salah satu best practice sebagai upaya perbaikan dan pemulihan krisis pembelajaran akibat keberadaan pandemi COVID-19 yang diluncurkan pertama kali tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, Kemdikbudristek juga memberikan kebijakan untuk sekolah yang belum siap untuk menggunakan Kurikulum Merdeka. Sekolah-sekolah tersebut masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran untuk pemulihan krisis pembelajaran tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Begitu juga Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut. Selama proses pengimplementasian

Kurikulum Merdeka sebagai salah satu opsi bagi satuan pendidikan ini dalam pelaksanaan proses pembelajaran, dilakukan proses pendataan untuk melihat satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka (Tohir, 2020). Setelahnya, tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan Kurikulum Nasional yang akan dilakukan oleh Kemdikbudristek berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran.

Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi acuan bagi Kemdikbudristek dalam pengambilan kebijakan lanjutan pasca pemulihan krisis pembelajaran. Pemulihan pembelajaran pasca pandemi menjadi hal yang disoroti oleh Kemdikbudristek karena dianggap sebagai hal yang penting. Pada proses pemulihan ini, internet, big data, artificial intelligence, 5G, dan komputasi awan akan banyak berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pasca pandemi (Zhu & Liu, 2020). Hal tersebut juga senada dengan rencana dari Kemdikbudristek yang melibatkan banyak teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses pemulihan pembelajaran pasca pandemi ini. Implementasi Kurikulum Merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif. Kemdikbudristek memberikan kebijakan mengenai keleluasaan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan tingkat kesiapannya.

Beberapa program yang mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah dengan program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK). Pada program tersebut Kemdikbudristek memberikan dukungan dalam IKM mendapatkan pengalaman yang baik dalam

mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Best practice dan konten pembelajaran dalam IKM pada SP/SMK-PK teridentifikasi dengan baik dan digambarkan dapat menjadi contoh bagi satuan pendidikan lainnya (Tohir, 2020). Penyediaan dukungan IKM yang diberikan oleh Kemdikbudristek adalah upaya dari Kemdikbudristek untuk memberikan dukungan pembelajaran IKM secara mandiri dan dukungan pendataan IKM jalur mandiri. Dukungan-dukungan yang diberikan oleh Kemdikbudristek tadi kemudian akan memperlihatkan calon satuan pendidikan yang terdata berminat untuk pelaksanaan IKM. Calon satuan pendidikan tersebut kemudian akan memperoleh pendampingan pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, sehingga guru, kepala sekolah, pengawas serta stakeholder dapat mengadakan kegiatan berbagi best practice dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka baik dalam bentuk seminar maupun lokal karya secara mandiri.

Hasil pendataan yang sebelumnya dilakukan oleh Kemdikbudristek akan diperoleh data kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, sehingga dapat terpetakan satuan pendidikan mana yang akan memperoleh dukungan berupa pendampingan di bawah Kemdikbudristek dalam menjalankan IKM jalur mandiri. Berbagai best practice dan konten pembelajaran dari Kurikulum Merdeka jalur mandiri teridentifikasi dengan jelas sehingga menjadi fokus pada pendampingan oleh Kemdikbudristek nantinya. Pendampingan ini mengarahkan pengimplementasian IKM menjadikan pembelajaran yang lebih aktif dan

adaptif dengan memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menjalankan proses pembelajaran yang berorientasi pada proyek pembelajaran (Kurniawan et al., 2023). SP/SMK-PK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dapat saling berbagi pengalaman best practice dan pembelajaran, sehingga diharapkan akan terbentuk jejaring dukungan antar guru dan tenaga kependidikan untuk berbagi konten pembelajaran dan best practice Kurikulum Merdeka.

Komunitas yang berkembang diharapkan dapat mendukung ekosistem yang siap menerapkan Kurikulum Merdeka secara nasional pada tahun 2024 yang secara masif dan terarah. Jejaring dukungan antar guru ini sangat membantu sebagai ekosistem yang baik untuk mendukung pengimplementasian suatu program dalam proses pembelajaran seperti yang disampaikan dalam penelitian yang dilakukan (Apriliyanti et al., 2022), menjadi salah satu sarana bagi guru untuk berbagi metode, strategi dan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya di masa pandemi Kurikulum Merdeka yang menjadi kebijakan dari Kemdikbudristek pelaksanaannya direncanakan dimulai pada 2021 yang diterapkan pada Sekolah Penggerak. Pada tahun 2022, Kemdikbudristek akan mencoba untuk melakukan pendataan yang nantinya akan menjadi dasar pada penerapan Kurikulum Merdeka ini ke depannya di satuan pendidikan. Terdapat beberapa strategi IKM jalur mandiri yang dipetakan oleh Kemdikbudristek di mana strategi ini juga akan dijadikan tindak lanjut dari kebijakan tersebut. Strategi pertama, yakni Rute Adopsi Kurikulum Merdeka Secara Bertahap (Hamdi et al., 2022). Dalam pendekatan strategi ini berfokus pada upaya

bagaimana memfasilitasi satuan pendidikan untuk mengenali kesiapannya sebagai dasar dalam menentukan pilihan IKM serta untuk memberikan umpan balik berkala setiap 3 bulan.

Hal tersebut dilakukan untuk memetakan kebutuhan penyesuaian dukungan IKM baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Strategi kedua, yakni Menyediakan Asesmen dan Perangkat Ajar (High Tech). Pada strategi kedua ini, pendekatan strategi difokuskan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam menyediakan beragam pilihan asesmen dan perangkat ajar (buku teks, modul ajar, contoh proyek, contoh kurikulum) dalam bentuk digital (Saripudin et al., 2022). Asesmen dan perangkat ajar tersebut dapat digunakan satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka. Strategi ketiga, yakni dengan Menyediakan Pelatihan Mandiri dan Sumber Belajar Guru (High Tech), di mana pada pendekatan strategi ini juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu.

Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Sejarah

Sejarah adalah ilmu tentang manusia dalam dimensi waktu dan tempat (ruang). Pemahaman konsep tentang ruang dan waktu merupakan materi dasar yang diajarkan pada tahun pertama sekolah menengah atas. Sampai saat ini materi tersebut seringkali dianggap hanya sebagai pengantar dan disampaikan sebatas hafalan. Padahal konsep ini sangat penting untuk memberikan landasan pemahaman bagi siswa untuk mengerti bahwa setiap peristiwa sejarah yang menyangkut perkembangan manusia tidak

lepas dari waktu atau masa mereka hidup dan tempat/lingkungan mereka (Ayundasari et al., 2021). Penjelasan konsep ini seharusnya diiringi dengan penggunaan teori-teori lintas disiplin sebagai pisau analisis peristiwa sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuan sejarah dalam kerangka berpikir yang utuh.

Kemampuan ini akan menumbuhkan sikap bijaksana dalam menilai sebuah peristiwa baik dalam konteks masa lalu, masa kini, maupun masa depan sehingga benih-benih radikalisme dan ekstrimisme dapat diminimalisir (Ayundasari et al., 2021). Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran sejarah tidak hanya muncul di sekolah terkait kebosanan karena hanya hafalan fakta dan peristiwa tetapi juga lemahnya penggunaan teori, miskinnya imajinasi, acuan buku teks dan kurikulum yang state oriented, serta kecenderungan untuk tidak memperhatikan fenomena globalisasi berikutan latar belakang historisnya (Mutiani & Suyadi, 2020). Salah satu perspektif baru yang ditawarkan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah pengemasan pembelajaran sejarah dengan pendekatan multidimensional. Pembelajaran dengan pendekatan multidimensi atau disebut juga sebagai pembelajaran lintas disiplin merujuk pada kombinasi berbagai disiplin ilmu sebagai komponen pembelajaran yang mandiri dan terpisah Indonesia pembelajaran sejarah hal ini disebabkan oleh banyak kendala dalam pelaksanaannya antara lain tidak adanya payung hukum berupa kurikulum, pengembangan perangkat yang banyak membutuhkan support system (Suhartono, 2021).

Namun kondisi ini menemukan titik terang ketika pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka yang secara eksplisit meminta guru untuk menyajikan materi sejarah secara utuh dan komprehensif (Yang et al., 2010). Dalam rangka menyambut baik kebijakan tersebut penulis ingin membahas tentang bagaimana posisi pembelajaran sejarah dalam Kurikulum Merdeka, peluang implementasi dan langkah langkah implementasi yang sebaiknya ditempuh. Beberapa tahun terakhir pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berinovasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia diberbagai lini baik dari segi sumberdaya manusia maupun sistem (Azanella, 2019). Hal ini dilakukan dengan mencetuskan beraneka program antara lain Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, PembaTIK, dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sebelumnya dikenal sebagai Kurikulum Prototipe yang diterapkan melalui pilot project di Sekolah Penggerak dan oleh Guru Penggerak. Tujuan pilot project ini adalah untuk menguji keefektifan pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan pelaksanaan pilot project ini bermuara pada peresmian Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum resmi di sekolah pada Februari 2022 oleh Mendikbud Ristek (Satriawan et al., 2021).

Implementasi kurikulum ini pada satuan pendidikan dilakukan secara bertahap berdasarkan waktu pendaftaran yang diikuti oleh satuan pendidikan. Pendaftaran ini dilakukan pada <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/> laman <https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/>. Selain itu, implementasi ini juga dibagi dalam tiga kategori yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Demi memudahkan pelaksanaan kurikulum ini pemerintah juga

menyediakan aplikasi berbasis android yang diberi nama Merdeka Mengajar. Kurikulum Merdeka merupakan angin segar bagi perbaikan pendidikan di Indonesia yang sempat terpuruk selama pandemi Covid-19, meskipun keefektifannya secara global masih perlu dibuktikan. Ide pengembangan Kurikulum Merdeka ini berawal dari beberapa kekurangan pada Kurikulum 2013 antara lain materi yang terlalu padat, implementasi yang kaku, dan materi yang membosankan.

Selain itu juga untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul sebagai dampak pembelajaran daring selama pandemi yaitu learning loss, ketertinggalan kemampuan akademik, dan rendahnya stimulasi pada anak (Subandowo et al., 2021) Jika dilihat secara sekilas berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Kurikulum Merdeka memiliki beberapa kelebihan dibanding Kurikulum 2013 (Ulhaq, 2017). Antara lain memberikan ruang yang lebih luas bagi guru dan siswa untuk berkreasi dan memutuskan prioritas belajar (materi esensial); satuan pendidikan dan guru memiliki wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum beserta kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolah pada tahap ini memungkinkan sekolah mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi lingkungan sekitar sehingga akan muncul link and match lulusan; dan secara administrasi tidak ada pemaksaan dalam implementasinya jadi satuan pendidikan dapat memutuskan menerapkan atau tidak sesuai dengan kemampuan dan kesiapan yang mereka miliki.

Tahapan penerapan dikategorikan menjadi tiga yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Tiga kelebihan lain yang diklaim oleh Kemendikbud Ristek pada Kurikulum Merdeka adalah proses pembelajaran yang dilakukan berbasis proyek untuk mengembangkan soft skills dan karakter siswa agar sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Selain itu, pada penerapan kurikulum ini dimungkinkan adanya deep learning untuk peningkatan literasi dan numerasi karena pembelajaran yang disajikan berfokus pada materi esensial. Hal yang tidak kalah menarik adalah konsep diferensiasi pembelajaran dimana guru dapat secara fleksibel merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan konteks muatan lokal. Mata pelajaran sejarah pada Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 memiliki perbedaan di antaranya tujuan pembelajaran, perubahan istilah kompetensi dasar, struktur kurikulum, ruang lingkup materi, dan adanya item standar kecakapan yang dimiliki siswa (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2022; Permendiknas, 2014).

Pertama, perbedaan tujuan pembelajaran sejarah yang cukup signifikan yaitu jumlah item tujuan pembelajaran, munculnya konsep kesadaran sejarah, pemahaman diri, pemahaman kolektif, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu juga muncul tujuan yang terkait dengan keterampilan berpikir multiperspektif dan keterampilan mengolah informasi sejarah secara non digital maupun digital (Yulifar, 2019). Pada tujuan ke-13 ini terbuka kesempatan bagi siswa untuk berkreasi membuat produk yang sesuai

dengan perkembangan jaman dan bisa menjadi rintisan kewirausahaan berbasis digital misalnya channel youtube tentang sejarah lokal, pengembangan game kesejarahan, dan komik sejarah. Perbedaan kedua adalah perubahan istilah kompetensi dasar menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk tingkat SMA terdiri dari dua fase yaitu Fase E dan Fase F, masing-masing fase memiliki 2 elemen yaitu pemahaman konsep sejarah dan keterampilan proses sejarah. Pada Fase E untuk kelas X siswa diwajibkan memahami konsep pengantar ilmu sejarah, menganalisis dan mengevaluasi peristiwa sejarah periode nenek moyang dan jalur rempah sampai periode kerajaan Islam; mampu menggunakan sumber primer atau sekunder untuk melakukan penelitian sejarah dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau media lain; dan memiliki keterampilan sejarah untuk menjelaskan peristiwa sejarah serta memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan pada Fase F siswa diwajibkan mampu mengembangkan konsep-konsep dasar sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah dalam lintasan lokal, nasional, dan global; mampu menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia yang dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan berbagai peristiwa lain yang terjadi di dunia pada periode kolonialisme sampai reformasi. Terdapat capaian tambahan yang harus dimiliki siswa Kelas XI dan kelas XII. Kelas X mampu menggunakan sumber primer dan/atau sekunder untuk melakukan penelitian sejarah secara diakronis dan/atau sinkronis kemudian mengomunikasikannya dalam bentuk lisan,

tulisan, dan/atau media lain; mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi peristiwa sejarah, serta memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Pusat Assemen Pendidikan, 2022).

Sedangkan siswa Kelas XII mampu menggunakan sumber primer dan sekunder untuk melakukan penelitian sejarah secara sinkronis dan/atau diakronis kemudian mengomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau media lain; mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi peristiwa sejarah dari berbagai perspektif serta mengaktualisasikan minat bakatnya dalam bidang sejarah melalui studi lanjutan atau kegiatan kesejarahan di luar sekolah. Perbedaan ketiga, adalah struktur kurikulum. Pada Kurikulum Merdeka tidak terdapat pembagian Sejarah Wajib dan Sejarah Peminatan (Pusat Assemen Pendidikan, 2022). Di kelas X pada Kurikulum Merdeka tidak terdapat Mata Pelajaran Sejarah tapi Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang terdiri dari Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, dan Geografi dimana masing-masing mendapatkan alokasi waktu 72 jam per tahun (2 jam per minggu). Meskipun dokumen kurikulum meniadakan istilah mata pelajaran secara spesifik tapi pemerintah memberikan kebebasan dalam pengorganisasian di setiap satuan pendidikan. Jadi bisa disampaikan secara terintegrasi yaitu dalam payung Mata Pelajaran IPS, melalui model blok waktu secara bergantian, atau diajarkan seperti biasa dalam mata pelajaran terpisah. Baru pada kelas XI dan XII mata pelajaran sejarah disajikan secara terpisah (MendikbudRistek, 2022).

Dari segi ruang lingkup mata pelajaran sejarah secara umum sama, hanya saja pada Kurikulum Merdeka ditambahkan materi Jalur Rempah. Perbedaan kelima, munculnya item lingkup Standar Kecakapan yang terdiri dari Keterampilan Konsep Sejarah (Historical Conceptual Skills), Keterampilan Berpikir Sejarah (Historical Thinking Skills), Kesadaran Sejarah (Historical Consciousness), Penelitian Sejarah (Historical Research), Keterampilan Praktis Sejarah (Historical Practice Skills) (Wijaya Mulya et al., 2022). Istilah pendekatan multidimensional dalam bidang penelitian telah berkembang sejak 1970-an), sedangkan di Indonesia mulai populer tahun 1980-an. Terdapat dua nama besar yang menggeluti penelitian lintas disiplin yaitu Sartono Kartodirdjo, seorang sejarawan dengan karya fenomenalnya yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888 dan Nathaniel Daldjoeni, seorang ahli geografi dengan karyanya Geografi Kesejarahan: Peradaban Dunia (Kartodirdjo, 1984). Kartodirdjo menyatakan bahwa pendekatan multidimensional adalah suatu pendekatan dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial untuk menganalisis peristiwa masa lampau.

Hambatan Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Sejarah

Kurikulum yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sebenarnya tidak begitu di setuju oleh semua sekolah dan juga guru yang mana guru merupakan pelaku utama dalam penerapan kurikulum (Isthofiyani dkk. 2014:85), ada sekolah yang menerima saja perubahan kurikulum dan mengambil sisi baiknya bahwa pemerintah pasti sudah mempertimbangkan

banyak hal untuk mengubah suatu sistem dalam pendidikan apalagi tentang kurikulum, namun ada juga sekolah yang merasa perubahan kurikulum sudah terlalu banyak dan berbeda-beda setiap pelaksanaannya, apalagi tidak semua sekolah itu serentak dalam mengubah kurikulum yang diterapkan di sekolahnya ini dikarenakan letak geografis yang berbeda juga berdampak pada kompetensi guru. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan (Sasmita & Darmansyah, 2022:5546) tentang faktor apa saja yang menjadi kendala guru dalam menerapkan kurikulum merdeka dan didapatkan hasil bahwa literasi, referensi, akses digital, kompetensi guru dan juga pengelolaan waktu menjadi faktor penyebab kendala nya penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ada beberapa kendala dalam menerapkan kurikulum merdeka di antaranya:

1. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah tentang Kurikulum Merdeka ke Sekolah-Sekolah. Pemerintah, memang mengadakan webinar maupun pelatihan-pelatihan tentang kurikulum merdeka, namun webinar maupun pelatihan itu hanya menerangkan tentang pentingnya konsep merdeka belajar di kurikulum merdeka padahal yang dibutuhkan pihak sekolah dan guru-guru ialah bagaimana penerapan poin to poin dalam proses pembelajaran. Dan jika guru menanyakan apa yang tidak ia pahami ke narasumber webinar atau pelatihan, jawaban dari narasumber belum memuaskan untuk menjawab keresahan guru tersebut, sehingga para guru belum benar-benar mengerti tentang penerapan proses pembelajaran pada konsep kurikulum merdeka. Hal ini juga terjadi pada guru di SMA Pasundan 2 Kota Cimahi, pemahaman para guru masih terdapat ketidaksesuaian dengan konsep kurikulum merdeka yang seharusnya, sehingga guru masih membutuhkan waktu untuk memahami lebih jauh bagaimana Kurikulum Merdeka yang seharusnya (Basri & Rahmi, 2023:7).
2. Kurangnya Persiapan Guru untuk beralih ke Kurikulum Merdeka, guru-guru menyadari mereka memiliki pengalaman yang kurang cukup dalam menggunakan perangkat pembelajaran dalam proses belajar mengajar, seharusnya pengalaman merupakan suatu bentuk persiapan untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru dalam mendapatkan pengamalan baru agar memperbarui kompetensi dan keterampilan profesinya (Ihsan, 2022:37). Banyak sekolah yang baru saja menerapkan kurikulum revisi 2013 sehingga mereka harus kembali menguasai kurikulum yang berbeda. Jika di Kurikulum 2013 terdapat kompetensi yang tertuju tertuang dalam KI, KD yang harus di capai pertahunnya, di Kurikulum Merdeka kompetensi yang dituju tertuang dalam capaian pembelajaran yang disusun perfase. Fase A untuk SD kelas 1 dan 2, Fase B untuk SD kelas 3 dan 4, Fase C untuk SD kelas 5 dan 6, fase D untuk SMP, fase E untuk SMA kelas X, dan fase F untuk SMA kelas 11 dan 12 (Kemendikbudristek, 2021). Lalu di Kurikulum Merdeka terdapat P5 yakni (Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila), P5 merupakan kegiatan kokurikuler di luar jam pelajaran wajib yang dapat dilakukan secara

fleksibel baik dari segi muatan, kegiatan dan waktu pelaksanaan (Deni, 2022:120). Sehingga peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru masih dibutuhkan waktu dan persiapan yang lebih baik lagi, namun guru juga berkomitmen seiring berjalannya waktu guru akan beradaptasi dan lebih siap mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Kondisi new normal juga menjadi tantangan tersendiri bagi para guru untuk menerapkan Kurikulum Merdeka ini dengan sistem luring, daring dan tatap muka terbatas (Yesika, 2022:4).

3. Sumber Belajar hanya terbatas di buku paket saja, karena kurikulum merdeka belum menjadi kurikulum nasional maka buku yang di beli sekolah juga belum lengkap sepenuhnya karena kurikulum ini masih percobaan dan masih menerima feedback dari sekolah yang menggunakan sehingga sewaktu-waktu buku paket dapat berubah baik isi dan edisinya sehingga sekolah berinisiatif untuk tidak dulu membeli buku paket Kurikulum Merdeka dengan edisi lengkap dan juga di toko buku terdekat belum terdapat buku-buku itu. Selain dari pada itu guru juga masih bingung untuk menggunakan media pembelajaran apa yang sesuai untuk mengajar peserta didik, walaupun demikian guru juga selalu berusaha memfasilitasi pembelajaran dengan media dan bahan ajar yang menarik dalam pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa soft skill yang merupakan kemampuan mengelola diri dan berinteraksi dengan orang lain harus terasah dengan baik karena salah satu kunci dalam pendidikan ialah soft skill harus dimulai dari

pendidikannya terlebih dahulu baru kemudian siswanya, karena guru yang kreatif dan inovatif akan menghasilkan siswa yang jauh lebih kreatif dan inovatif serta berinisiatif (Sasmita eli, 2022:5548). Dunia pendidikan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dimana teknologi yang juga sudah berkembang pesat di zaman ini. Dan pola pembelajaran bukan hanya berpusat pada guru saja namun juga berpusat pada siswa, guru dan siswa harus bisa berkolaborasi (Darise, 2019:43). Seharusnya Kurikulum Merdeka membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan sumber belajar yang di dapat dari apa saja, tidak monoton dan kreatif serta inovatif.

Maka dari itu demi mengatasi berbagai tantangan implementasi Kurikulum Merdeka, langkah konkrit yang dapat diambil mencakup peningkatan sosialisasi melalui webinar, workshop nasional, distribusi panduan resmi, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh sekolah memahami tujuan dan konsep kurikulum ini. Selain itu, pelatihan intensif berbasis kompetensi bagi guru perlu dilakukan, termasuk simulasi penerapan kurikulum dan mentoring oleh guru berpengalaman, disertai pemberian insentif untuk mendorong partisipasi aktif.

Pengembangan sumber belajar juga harus diperluas dengan menyediakan platform digital interaktif, menjalin kerja sama dengan penerbit, dan memanfaatkan media lokal agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan kontekstual. Langkah ini perlu didukung dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan melalui survei, pendampingan, serta

pembentukan tim pendamping kurikulum untuk membantu sekolah yang menghadapi kesulitan. Dengan strategi ini, diharapkan implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Paradigma pembelajaran sejarah dalam Kurikulum Merdeka menghadirkan perubahan signifikan dalam cara pengajaran dan pemahaman sejarah di sekolah. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi materi sejarah dengan lebih mendalam dan sesuai dengan minat mereka. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, di mana mereka tidak hanya menghafal fakta sejarah, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menghubungkan peristiwa sejarah dengan konteks masa kini. Secara keseluruhan, paradigma pembelajaran sejarah dalam Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menghasilkan siswa yang tidak hanya paham secara teoretis, tetapi juga memiliki kemampuan kritis, analitis, dan kontekstual dalam memandang sejarah. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan relevan, pembelajaran sejarah diharapkan dapat membangun kesadaran sejarah yang lebih mendalam, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan dengan pemahaman yang lebih luas tentang sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

Hambatan dalam penerapan paradigma pembelajaran sejarah pada Kurikulum Merdeka menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan

siswa. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi perubahan metode pengajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami atau menguasai metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis proyek, sehingga proses belajar mengajar sejarah seringkali masih terjebak dalam pola tradisional yang berfokus pada hafalan fakta sejarah. Secara keseluruhan, meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan banyak peluang untuk memperbaiki pembelajaran sejarah agar lebih relevan dan kontekstual, hambatan seperti kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur, dan perbedaan sumber daya antar sekolah perlu diatasi. Solusi seperti pelatihan guru, peningkatan akses terhadap teknologi, dan pengembangan kerjasama antara sekolah dan lembaga terkait dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, tujuan Kurikulum Merdeka dalam menciptakan pembelajaran sejarah yang lebih kritis, interaktif, dan relevan dapat tercapai secara lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, W., Saidatul, I., & Kholida, F. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar. *METODIK DIDAKTIK Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 16(2), 102–107.
- Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v5n3p1>
- Amalia, A., & Sa'adah, N. (2020). Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Di Indonesia. *Jurnal Psikologi*,

- 13(2), 214–225.
<https://doi.org/10.35760/psi.2020.v13i2.3572>
- Apriliyanti, M. W., Ardiyansyah, M., Arum, P., Jayus, & Sjaifullah, A. (2022). Identifikasi senyawa kimia pada minuman kulit melinjo menggunakan gas chromatography-mass spectroscopy. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 22(2), 114–118.
- Ayundasari, L., Nafi'ah, U., Jauhari, N., & Utari, S. D. (2021). SHEMA (Society, Humanity, Equality, Morality): A New Perspective in Learning History. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 747(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/747/1/012054>
- Azanella, L. A. (2019). Benarkah pelajaran sejarah akan dihapus menurut kurikulum? Ini istilah Kemendikbud. *Kompas.Com*.
- Halim, F., & Sudirman, A. (2020). *Jurnal Manajemen dan Bisnis THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN INCREASING MARKET SHARE OF MSME*. 9(2), 61–72.
- Hamdi, S., Triatna, C., & Nurdin, N. (2022). Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pedagogik. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 7(1), 10–17.
<https://doi.org/10.30998/sap.v7i1.13015>
- Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 1–29.
- Hidayati, V. N., Dani, F. R., Wati, M. S., & Putri, M. Y. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Motivasi Siswa Kelas X Di Sman 1 Payung Sekaki. *Jurnal Eduscience*, 9(3), 707–716.
<https://doi.org/10.36987/jes.v9i3.3443>
- Kurniawan, H. (2021). Paradigma Baru Pendidikan Dan Pembelajaran Sejarah Dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 4(2), 128.
<https://doi.org/10.17977/um0330v4i2p128-142>
- Kurniawan, H., Suprialna, N., Mulyana, A., & Yulifar, L. (2023). Public history of chinese-javanese harmony in yogyakarta for history learning with diversity insights. *Paramita*, 33(1), 139–149.
<https://doi.org/10.15294/paramita.v33i1.35720>
- Martono, T., Baedhowi, B., Sawiji, H., Totalia, S. A., Wahyono, B., & Octoria, D. (2020). The Effectiveness of High School Affirmations (ADEM) Repatriation: Empirical Evidence from Central Java and Special Region of Yogyakarta, Indonesia. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 3(4), 1841–1847.
<https://doi.org/10.33258/birle.v3i4.1380>
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. (2022). Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147.
<https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>
- Mutiani, R., & Suyadi, S. (2020). Diagnosa Diskalkulia Generasi Alpha: Masalah dan Perkembangannya. *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 104–112.
<https://doi.org/10.33487/edumaspol.v4i1.278>
- Pangestu, D. A., & Rochmat, S. (2021). Filosofi Merdeka Belajar Berdasarkan Perspektif Pendiri Bangsa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 78–92.
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1823>
- Pusat Assemen Pendidikan. (2022). *Capaian Pembelajaran SMA Paket C. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Rahmawati, F. D., Sutiyah, & Abidin, N. (2022). Urgensi Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Society 5.0. *E-Tech*. 22(1), 1–15.
- Saripudin, D., Yulifar, L., Fauzi, W. I., & Anggraini, D. N. (2022). Pemanfaatan Dan Penggunaan E-Book Interaktif Sejarah Lokal Jawa Barat Bagi Guru-Guru Sma/Smk Melalui in/on Training. *Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 5(2), 137–146.
- Satriawan, W., Santika, I. D., Naim, A., Tarbiyah, F., Raya, B., Selatan, L., Timur, L., Bakoman, A., & Panggung, P. (2021). Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam Volume*, 11(1), 1–12.
- Subandowo, M., Karyono, H., Gunawan, W., & Andriani, W. (2021). Learning Loss dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Corona. *Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran. Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6, 290–296.
[Http://Ojs.lptpisurakarta.Org/Index.Php/Edudikara/Article/View/262](http://Ojs.lptpisurakarta.Org/Index.Php/Edudikara/Article/View/262), 1(1), 485–501.
- Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19.
<https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13897>

- Tohir, M. (2020). Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. In Dirjen Kemendikbud RI.
- Ulhaq, Z. (2017). Pembelajaran Sejarah Berbasis Kurikulum 2013 di SMA Kotamadya Jakarta Timur. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6(2), 49–60. <https://doi.org/10.21009/jps.062.06>
- Wijaya Mulya, T., Aditomo, A., & Suryani, A. (2022). On being a religiously tolerant Muslim: discursive contestations among pre-service teachers in contemporary Indonesia. *British Journal of Religious Education*, 44(1), 66–79. <https://doi.org/10.1080/01416200.2021.1917338>
- Winarti, M., Kusmarni, Y., Makmur, T., & Yulianti, I. (2022). Memotret Pembelajaran Sejarah Daring di SMA Kota Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19. *Diakronika*, 22(2), 215–239. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol22-iss2/287>
- Yang, F., Cho, S. W., Son, S. M., Bogatyrev, S. R., Singh, D., Green, J. J., Mei, Y., Park, S., Bhang, S. H., Kim, B. S., Langer, R., & Anderson, D. G. (2010). Genetic engineering of human stem cells for enhanced angiogenesis using biodegradable polymeric nanoparticles. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 107(8), 3317–3322. <https://doi.org/10.1073/pnas.0905432106>
- Yulifar, L. (2019). Teacher's Effort in Improving Historical Writing Skill by Presenting Historian as Resources Person on Historical Learning. April. <https://doi.org/10.2991/icoie-18.2019.52>
- Zhu, J., & Liu, W. (2020). A tale of two databases: the use of Web of Science and Scopus in academic papers. *Scientometrics*, 123(1), 321–335. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03387-8>